

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak krisis perekonomian yang melanda dunia pada masa itu, iklim investasi telah berubah. Krisis perekonomian telah memberikan dampak yang menurunkan aktivitas perekonomian serta turunnya tingkat percaya dari beberapa investor juga terhadap prospek ekonomi pada masa depan. Meningkatnya resiko dan ketidakpastian hukum yang ada di Indonesia, membuat investor menjadi tidak ingin untuk berinvestasi di Indonesia. Oleh karena itu, sumber pendapatan menjadi lebih sedikit dan pada akhirnya menyebabkan pengangguran.

Setelah kejadian pada awal krisis ekonomi di tahun 1999, pemerintah telah melakukan ribuan hal termasuknya untuk meningkatkan utang atau pinjaman dari negara lain. Terjadi peningkatan pada dana pinjaman di tahun 2000 yaitu sebesar US\$ 133.073,00 yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan nilai rupiah terhadap mata uang asing, dan membutuhkan mata uang asing dalam jumlah besar, yang dimana cadangan mata uang asing sebelumnya telah habis.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses untuk meningkatkan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhatikan pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan mendasar dalam struktur ekonomi dalam suatu negara dan distribusi pendapatan bagi penduduk. Dengan hal lain, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan output perkapita dalam jangka panjang dan merupakan ukuran keberhasilan pembangunan. Kondisi tersebut juga ditunjukkan dengan masuknya dana ke dalam sistem perekonomian suatu negara.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, untuk dapat membangun bangsa dan negara tanpa mengharap bantuan dari negara lain. Tentu hal tersebut pernah dicoba sebelumnya, akan tetapi sulit bagi Indonesia untuk tetap

bertahan ditengah derasnya arus globalisasi yang terus berkembang pesat. Dengan kondisi tersebut, Indonesia berusaha membuka diri dengan menjalin kerjasama dengan negara lain untuk pelaksanaan pembangunan nasional, terutama dalam segi perekonomian. Dimana pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia merupakan upaya berkelanjutan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut pembangunan nasional dipusatkan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk bagian dari negara berkembang yang tengah fokus pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi bisa diartikan sebagai proses yang mengarah pada peningkatan pendapatan rill per kapita penduduk negara dalam jangka panjang dan disertai dengan perbaikan sistem terhadap lembaga. Indonesia memercayai perekonomian yang terbuka, dimana dengan mengatur perekonomian tersebut maka pemerintah tidak lepas dari keberadaan interaksi pada sektor swasta atau negara lain. Pada kasus ini, Indonesia tentu membutuhkan dana yang cukup untuk dapat membangun perekonomian yang adil dan makmur bagi rakyatnya. Pertumbuhan ekonomi yang besar bisa menjadi indikator suatu keberhasilan negara dalam membuat roda pembangunan menjadi berfungsi, dan pada akhirnya akan digunakan secara utuh terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Seperti negara berkembang lainnya, Indonesia yang bergantung pada utang luar negeri dapat membiayai pembangunan (Dion Maulana, 2016).

Perekonomian Indonesia telah mencapai pertumbuhan yang positif di setiap tahunnya, akan tetapi perekonomian Indonesia semakin membaik, ketika krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998 yang mengakibatkan perekonomian menjadi shortfall (pertumbuhan negatif) sekitar -13,1%.

| Tahun | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Pertumbuhan Ekonomi (%) | 7,0 | 6,2 | 5,8 | 7,2 | 6,8 | 5,8 |

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Sebelum Terjadinya Krisis Moneter

Indonesia pernah mengalami suatu kondisi perekonomian yang menjanjikan pada awal dekade 1980-an sampai pertengahan dekade 1990-an. Pada data yang ada di Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terjadi di tahun 1986 hingga 1989 mengalami peningkatan secara terus-menerus, yaitu sebesar 5.9% pada tahun 1986, lalu 6,9 di tahun 1988 dan 7.5% di tahun 1989. Akan tetapi pada tahun 1990 hingga 1991 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7.0% serta kemudian di tahun selanjutnya sekitar 1992, 1993, 1994, 1995, dan 1996 pada setiap tingkatan pertumbuhannya sekitar 6.2%, 5.8%, 7.2%, 6.8% dan 5.8%.

Hal tersebut dibuktikan dengan angka inflasi yang stabil, jumlah pengangguran yang cukup rendah seiring dengan stabilnya kondisi investasi yang ditandai dengan kesempatan kerja yang terus meningkat, serta angka kemiskinan yang berhasil ditekan. Namun perekonomian Indonesia akhirnya gugur dengan terjadinya krisis ekonomi yang melanda secara worldwide di seluruh dunia pada tahun 1997. Dan pada akhirnya meningkatkan angka inflasi, nilai kurs Rupiah yang terus melemah, meningkatnya angka pengangguran dengan diiringi kecilnya kesempatan kerja.

Kepadatan penduduk yang cukup tinggi bisa menghadirkan berbagai tantangan serta hambatan terhadap upaya pembangunan yang telah terjadi di negara berkembang, contohnya seperti Indonesia. Dikarenakan jumlah penduduk yang begitu tinggi, sehingga dapat menyebabkan sejumlah tenaga kerja menjadi meningkat pesat, sementara itu negara berkembang hanya mampu menciptakan lapangan kerja baru yang masih terbilang cukup terbatas.

Peran tenaga kerja sebagai faktor produktif yang dapat mengganggu pendapatan nasional. Maka dari itu pentingnya ketenagakerjaan bukan hanya dari jumlah saja, akan tetapi bisa dilihat dari suatu keunggulan. Jika seorang pekerja memiliki keunggulan yang baik, maka akan memberikan dampak peningkatan produksi yang baik juga. Ada banyak ragam pekerja, mulai dari usia, jenis kelamin, keahlian bekerja, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Sehingga pembentukan strategi bagi tenaga kerja sangat penting terhadap pembangunan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Upaya terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi perlu adanya sebuah faktor pendukung yang mampu memberikan pengaruh baik bagi pertumbuhan ekonomi itu sendiri, yaitu seperti utang luar negeri sebagai sumber yang membiayai pembangunan dan penanaman modal asing yang dapat membantu meningkatkan pemasukan negara.

Utang luar negeri merupakan konsekuensi biaya yang harus dibayar akibat pengelolaan ekonomi yang tidak seimbang, ditambah dengan proses pemulihan ekonomi yang tidak komprehensif dan konsisten. Hal tersebut menyebabkan turunnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dimasa yang akan datang, sehingga jelas akan membebani masyarakat khususnya bagi wajib pajak di Indonesia. Untuk memaksimalkan sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia, diperlukan modal dan teknologi untuk menggantinya. Sehingga pembiayaan kegiatan ekonomi dalam negeri tidak bergantung pada bantuan instan dari luar negeri, oleh karena itu pemerintah memilih cara alternatif yaitu dengan berusaha memaksimalkan investasi.

Dengan berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh dunia investasi, seperti masalah regulasi ketenagakerjaan yang kurang kondusif, kebijakan investasi dan sektoral yang tumpang tindih baik antara daerah maupun antara pusat dan daerah yang terkait dengan penerapan otonomi daerah, kondisi keamanan yang belum kondusif di beberapa daerah, prosedur birokrasi yang panjang dan berbelit serta kondisi infrastruktur yang belum memadai dan masalah lain seperti kepastian hukum.

Utang tersebut sudah cukup berat, mengingat cicilan dan juga bunga yang tidak terbilang kecil. Biaya tersebut telah melebihi kapabilitas yang wajar sehingga biaya terhadap kebutuhan pokok yang cukup esensial menjadi kecil, dan pada akhirnya akan memberikan dampak yang besar. Sebagai negara berkembang dengan karakteristik serta masalah ekonomi, politik, sosial dan budaya yang juga terbilang sama di beberapa negara berkembang lainnya. Indonesia juga memiliki permasalahan terhadap utang luar negeri, namun sekitar 25 tahun terakhir yang terhitung dari tahun 1996 hingga tahun 2020, utang luar negeri tersebut juga telah banyak membantu dalam pembangunan Indonesia.

Sekitar awal tahun 1980-an, telah terjadi krisis global tentang permasalahan utang luar negeri yang melanda banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Banyaknya negara yang semakin terperosok akibat utang luar negeri tersebut, meski telah sering dilakukannya suatu perubahan yang maju terhadap perekonomian. Akan tetapi, upaya dalam meningkatkan pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tidak berarti dengan sendirinya bisa disebut sebagai negara maju, yang berarti sebuah sistem perekonomian berubah menjadi ekonomi industri dan perdagangan luar negeri yang stabil. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya, ketika terjadi tinggi rendahnya tingkat utang luar negeri yang diterima oleh banyak negara berkembang, serta kurangnya dana investasi yang sudah tidak bisa ditutupi lagi dengan bantuan dana yang ada dalam negeri.

Untuk suatu negara yang masih berkembang termasuk Indonesia, modal yang bergerak cepat merupakan sebuah peluang yang baik untuk mendapatkan biaya dalam pembangunan ekonomi. Sedangkan pembangunan ekonomi yang dipimpin oleh pemerintah Indonesia merupakan bentuk upaya yang berkesinambungan menurut Pancasila dan UUD 1945, agar bisa mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut dengan menitikberatkan kepada pembangunan ekonomi. Dengan seiring berjalannya waktu, utang luar negeri Indonesia seakan menjadi bumerang karena menyisakan banyak masalah termasuk utang luar negeri yang berbunga tinggi. Utang luar negeri merupakan porsi terbesar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam kurang lebih di 10 tahun terakhir. Sementara itu, Indonesia masih perlu mendukung pembiayaan dalam berbagai sektor ekonomi yang sedang kritis dan mendesak.

| Tahun | Pertumbuhan Ekonomi (%) | Utang Luar Negeri (%) | Penanaman Modal Asing (%) | Jumlah Tenaga Kerja (%) |
|-------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1996 | 7,82 | 1,51 | 14,71 | 66,85 |
| 1997 | 4,70 | 2,19 | 1,12 | 66,32 |
| 1998 | -13,10 | 4,74 | 2,68 | 66,91 |
| 1999 | 0,79 | 4,71 | 3,93 | 67,22 |
| 2000 | 4,92 | 6,30 | 7,55 | 67,76 |
| 2001 | 3,45 | 6,51 | 2,49 | 68,60 |
| 2002 | 4,38 | 5,85 | 0,23 | 67,76 |
| 2003 | 4,78 | 6,06 | 1,92 | 67,86 |
| 2004 | 5,03 | 6,74 | 2,89 | 67,55 |
| 2005 | 5,69 | 6,86 | 6,14 | 66,79 |
| 2006 | 5,50 | 5,77 | 3,79 | 66,16 |
| 2007 | 6,28 | 6,36 | 6,79 | 66,99 |
| 2008 | 6,06 | 9,85 | 10,41 | 67,18 |
| 2009 | 4,61 | 11,47 | 6,47 | 67,23 |
| 2010 | 6,22 | 17,09 | 6,47 | 67,72 |
| 2011 | 6,17 | 11,34 | 10,32 | 66,78 |
| 2012 | 6,03 | 11,98 | 2,30 | 67,76 |
| 2013 | 5,56 | 5,45 | 2,55 | 66,77 |
| 2014 | 5,01 | 10,23 | 2,81 | 66,60 |
| 2015 | 4,88 | 5,93 | 2,29 | 65,76 |
| 2016 | 5,03 | 2,04 | 0,48 | 66,34 |
| 2017 | 5,07 | 10,20 | 2,01 | 66,67 |
| 2018 | 5,17 | 6,50 | 1,81 | 67,31 |
| 2019 | 5,02 | 7,50 | 2,23 | 67,53 |
| 2020 | 2,97 | 3,40 | 1,81 | 67,77 |

Sumber: World Bank (data diolah)

Tabel 1. 2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Utang Luar Negeri, Penanaman Modal Asing dan Jumlah Tenaga Kerja Tahun 1996-2020

Pada semangat duet Harrod-Domar, bantuan dari luar negeri dilihat mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Bantuan dari luar negeri memberikan alasan yang bisa memberikan tingkatan pendapatan, untuk itu bantuan dari luar negeri jelas memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Pada sisi lain penanaman modal asing dan juga investasi portofolio yang merupakan bentuk lain dari pembiayaan pada pembangunan serta pertumbuhan ekonomi nasional. Penanaman modal asing, baik itu dari investasi langsung ataupun investasi portofolio, yang bertujuan untuk menggantikan peran utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan terhadap pembangunan dan pertumbuhan perekonomian nasional. Penanaman modal asing menjadi semakin penting, yang dikarenakan jumlah utang luar negeri yang meningkat pesat.

Penanaman modal asing, adalah cara lain untuk membantu memenuhi kebutuhan modal pada pembangunan. Di Indonesia dalam Undang-Undang yang sudah diatur terhadap penanaman modal asing yang menjadi dasar hukum pemindahan penanaman modal asing ke Indonesia. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki lingkungan dunia, sehingga dapat menarik minat dunia usaha khususnya dari pihak asing. Demikian terbentuklah Undang-Undang No 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing, dengan seiring berjalannya waktu, telah disempurnakannya peraturan tersebut pada tahun 1970 yakni, Undang-Undang No 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing yang disempurnakan oleh Undang- Undang No 11 Tahun 1970.

Perkembangan penanaman modal asing ke Indonesia memang positif, akan tetapi pada rata-rata jika dibandingkan dengan negara Malaysia, Thailand, Singapura, Korea dan Cina masih cukup rendah dalam penanaman modal asing. Hal ini menunjukkan bahwa negara tersebut lebih menarik bagi investor asing dibandingkan Indonesia, oleh karena itu pentingnya untuk melihan dan mengolahnya agar uang dari penanaman modal asing tidak serta merta langsung berpindah ke negara tersebut yang di nilai mengalami pertumbuhan ekonomi, memberikan berbagai insentif dan stabilitas sosial politik yang lebih baik.

Aliran masuk modal asing (capital inflows) dapat berperan dalam menutup

kesenjangan devisa akibat defisit transaksi berjalan. Selain itu, masuknya modal asing juga mampu mendorong lesunya kegiatan ekonomi akibat kekurangan modal (saving investment gap) untuk pelaksanaan pembangunan ekonomi. Modal asing ini selain menjadi transfer modal juga dapat memberikan kontribusi yang baik melalui arus industrialisasi dan modernisasi.

Dalam jangka pendek, utang luar negeri bisa membantu pemerintah Indonesia dalam usaha menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), akibat pembelanjaan rutin dan belanja pembangunan yang besar. Maka dari itu, laju pertumbuhan ekonomi dapat dipacu dengan penyesuaian target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi, jika dalam jangka panjang utang luar negeri tersebut dapat menimbulkan permasalahan ekonomi di Indonesia.

Ada beberapa negara yang tercatat “aktif” dalam hal memberi bantuan berupa pinjaman kepada Indonesia, baik di Asia, Eropa, Amerika Serikat serta beberapa Lembaga Keuangan Internasional lainnya. Indonesia merupakan negara “favorit” bagi para kreditor, karena dibalik pinjaman luar negeri tersebut, terdapat kepentingan politik yang pada akhirnya mempengaruhi kebijakan moneter dan finansial Indonesia sendiri. Berikut beberapa Negara atau Lembaga pemberi pinjaman terbesar bagi Indonesia:

| Negara | Persentase (%) | Jumlah Pinjaman (Miliar US\$) | Jumlah Pinjaman (Rp Triliun) |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Jepang | 45,5 | 29.8 | 358 |
| ADB (Asian Development Bank) | 16,4 | 10.8 | 129 |
| World Bank | 13.6 | 8.9 | 107 |
| Jerman | 7 | 3.1 | 37 |
| Amerika Serikat | 3.7 | 2.3 | 28 |
| Inggris | 1.7 | 1.1 | 13 |
| Negara/Lembaga lain | 14.6 | 9.6 | 115 |

Sumber:UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)

Tabel 1.3 Daftar Negara/Lembaga Kreditor (Pemberi Utang Luar Negeri) Terbesar Untuk Indonesia

Pemikiran yang mendukung bahwa modal asing berpengaruh baik terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mereka berkesimpulan bahwa hanya sebagian kecil modal asing yang berpengaruh baik terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penanaman Modal Asing dan Utang Luar Negeri, dalam jangka pendek akan memperbesar pertumbuhan ekonomi, semakin banyak negara ketergantungan maka akan semakin besar perbedaan penghasilan dan pada akhirnya pemerataan menjadi tidak tercapai.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, Utang Luar Negeri, Penanaman Modal Asing dan Jumlah Tenaga Kerja mempunyai dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Akan tetapi, terdapat banyak kontradiksi dalam teori dan penerapannya di Indonesia, dan yang akan di teliti sekaligus dibahas dalam penelitian ini adalah masalah Utang Luar Negeri dan Penanaman Modal Asing yang berkaitan dengan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Dengan judul **“Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri (ULN), Penanaman Modal Asing (PMA) Dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1996 - 2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah tersampaikan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi objek analisis penelitian yaitu:

- a. Bagaimana pengaruh Utang Luar Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 1996 - 2020?
- b. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 1996 - 2020?
- c. Bagaimana pengaruh Jumlah Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 1996 - 2020?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pengaruh Utang Luar Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 1996 - 2020.
- Untuk mengetahui pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 1996 - 2020.
- Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 1996 - 2020.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bisa menjadi masukan bagi pemerintah, terutama instansi terkait.
- Bisa menjadi masukan bagi masyarakat Indonesia agar dapat mengetahui kondisi perekonomian Indonesia yang berhubungan dengan Utang Luar Negeri, Penanaman Modal Asing dan Jumlah Tenaga Kerja.
- Sebagai penambah wawasan bagi penulis dalam Perekonomian Indonesia yang berhubungan dengan Utang Luar Negeri, Penanaman Modal Asing dan Jumlah Tenaga Kerja.
- Bisa menjadi sebuah referensi bagi peneliti lain yang sedang meneliti topik yang terkait dengan penelitian ini